Pengelolaan Kantin Pondok Pesantren Al-Barkah Kec.Tanggeung Kab. Cianjur Perspektif Kaidah Fikih Akad Mudarabah

Sri Desti

STISNU Cianjur

Abstrak

Pengelolaan kantin Pondok Pesantren Al-Barkah menggunakan akad Mudarabah. Namun, untuk menegaskan pelaksanaan akad tersebut perlu ditelaah dari segi keabsahannya menurut perspektif kaidah fikih akad mudarabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan kantin Pondok Pesantren Al-Barkah Kec.Tanggeung Kab. Tanggeung dan perspektif kaidah fikih akad mudarabah terhadap pengelolaan kantin Pondok Pesantren Al-Barkah Kec.Tanggeung Kab. Cianjur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun tekniknya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pemilik modal dan pengelolanya. Analisis datanya dilakukan dengan mengklarifikasi data-data yang diperoleh kemudian divalidasi dengan membandingkan dan mencocokkan data dari berbagai hasil teknik pengumpulan data tersebut, kemudian disimpulkan. Sumber primernya adalah data yang diperoleh di lapangan ditambah dengan buku-buku “Kaidah Fikih Muamalah” ditambah dengan sejumlah penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantin Pondok Pesantren Al-Barkah dikelola dengan sistem *Mudarabah*, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola kantin (*mudharib*) menyusun perjanjian kerja sama secara tertulis sebelum memulai usaha. Secara umum, pengelolaan kantin tersebut telah sesuai dengan kaidah fikih hakad *Mudarabah*. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan *Mudarabah*, seperti keterlibatan pemilik modal dalam operasional bisnis serta ketidaksesuaian dalam pembagian hasil.

Kata Kunci : Kantin, Pesantren, Al-Barkah, Tanggeung Cianjur, Kaidah Fikih Mudarabah.

Management of the Canteen at Pondok Pesantren Al-Barkah, Tanggeung District, Cianjur Regency from the Perspective of Legal Maxims on Mudarabah Contracts

Abstract

The management of the canteen at Pondok Pesantren Al-Barkah applies the mudarabah contract. However, to affirm the implementation of this contract, its validity needs to be examined from the perspective of legal maxims on mudarabah contracts. This study aims to analyze the management of the canteen at Pondok Pesantren Al-Barkah, Kec. Tanggeung, Kab. Cianjur, and assess it from the perspective of legal maxims on the mudarabah contract. This research employs a qualitative method, utilizing observation, interviews, and documentation techniques with both the capital provider and the business manager. Data analysis is carried out by clarifying the collected information, validating it by comparing and cross-checking data from various collection techniques, and then drawing conclusions. The primary sources for this study include field data, along with references from books such as *Kaidah Fikih Muamalah* and previous research. The findings indicate that the canteen at Pondok Pesantren Al-Barkah operates under a mudarabah system, where the capital provider (*shahibul mal*) and the canteen manager (*mudlarib*) establish a written cooperation agreement before starting the business. In general, the canteen management aligns with the legal maxims of the mudarabah contract. However, some aspects do not fully comply with mudarabah regulations, such as the involvement of the capital provider in business operations and discrepancies in profit-sharing arrangements.

Keywords : Canteen, Pesantren, Al-Barkah, Tanggeung Cianjur, Legal Maxims of Mudarabah.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Namun, seiring waktu, ajaran muamalah sering diabaikan, menyebabkan pemahaman Islam yang parsial. Padahal, Islam mengajarkan umatnya untuk mengamalkan ajarannya secara menyeluruh (kaffah). Dalam fiqih muamalah, Islam tidak hanya membahas cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan, tetapi juga mengatur kepemilikan individu agar tidak merugikan kepentingan sosial.

Bisnis syariah dalam Islam tidak hanya berorientasi pada materi, tetapi juga bertujuan menghindari kemudharatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tujuannya adalah agar manusia tidak bersikap rakus terhadap kekayaan dan menyadari bahwa ada

aspek yang lebih penting daripada sekadar materi.¹ Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita perlu bekerja sama dan saling membantu, terutama antara yang mampu dan yang membutuhkan, agar terjalin hubungan sosial yang harmonis.

Konsep bisnis syariah berbasis *Mudarabah* membantu mereka yang kekurangan modal atau keahlian dalam berbisnis. Ada orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu mengelolanya, sementara yang lain memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal. Islam membolehkan kerja sama antara keduanya untuk memperoleh keuntungan. Dalam akad ini, pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan modal kepada pengelola usaha (*mudharib*) agar mereka dapat bekerja sama demi kemaslahatan umat.²

Banyak orang yang melakukan bisnis yang berbasis *Mudarabah* diantaranya yaitu Kantin Pondok Pesantren Al-Barkah berperan penting dalam menyediakan makanan dan minuman bagi penghuni asrama. Sebagai tempat penyedia konsumsi, kantin harus memastikan kebersihan dan pengelolaan yang baik, karena makanan yang tidak ditangani dengan benar dapat menjadi sumber penyakit.

Kantin berperan penting dalam penyediaan makanan bagi siswa, guru, dan warga sekolah, sekaligus menjadi sarana edukasi tentang konsumsi jajanan sehat. Mengingat anak-anak menghabiskan banyak waktu di sekolah, keberadaan kantin sehat mendukung promosi kesehatan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.

Di era modern, banyak cara untuk menyalurkan dana guna mengembangkan usaha, termasuk kantin di Pondok Pesantren Al-Barkah. Konsep muamalah yang diterapkan dalam pengelolaannya adalah *Mudarabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha. Dalam sistem ini, pemilik modal memberikan dananya kepada pengelola untuk dikelola dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama.³ Karena dalam mobilisasi dana mudharib lebih menyukai sistem berbagi hasil (*Mudarabah*) dengan pertimbangan tidak terlalu beresiko bagi *mudharib*, serta relatif mudah dalam penerapan.

Dalam masyarakat, terdapat perbedaan kondisi ekonomi, di mana sebagian memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian berbisnis, sementara yang lain memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal. Untuk mengatasi ketimpangan ini, Islam

---

¹Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grapika, 2012), h.3.

²Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.86.

³Syafri Muhamad Noor, *Hadist Syirkah dan Mudarabah*, (Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.28.

mensyariatkan *Mudarabah* sebagai solusi yang saling menguntungkan, guna memenuhi kebutuhan dan menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak.⁴

Rasulullah Saw pernah melakukan akad *Mudarabah* dengan mengambil modal dari Siti Khadijah saat berdagang ke Syam. Praktik *Mudarabah* sudah ada sejak masa Jahiliyah dan kemudian diperbolehkan dalam Islam karena sangat dibutuhkan. Akad ini menjadi solusi bagi mereka yang memiliki modal tetapi kurang mahir berdagang, sekaligus sebagai bentuk kerja sama dan tolong-menolong untuk kemajuan bersama.⁵

Akad *Mudarabah* didasarkan pada kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad ini, pemilik modal tidak berhak ikut campur dalam pengelolaan usaha, kecuali sebatas memberi saran. Kepercayaan menjadi unsur utama, dan perjanjian yang telah disepakati harus dijaga serta tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.⁶ Praktik akad *Mudarabah* di kantin Pondok Pesantren Al-Barkah masih memiliki ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Permasalahan utama adalah keterlibatan pemilik modal dalam pengelolaan usaha, yang seharusnya menjadi wewenang penuh *mudharib*. Selain itu, perjanjian kurang jelas karena tidak mencantumkan kriteria kelalaian pengelola dalam menjalankan bisnis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan kantin Pondok Pesantren Al-Barkah Tanggeung Kab. Cianjur dan mengetahui perspektif kaidah fikih akad *mudarabah* terhadap pengelolaan kantin Pondok Pesantren Al-Barkah Kec. Tanggeung Kab. Cianjur.

Literature Review

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian saat ini, tapi memiliki perbedaan yang signifikan terutama terkait dengan analisisnya. Di antara penelitian tersebut dilakukan oleh Muhamad Al Imran⁷, Muharir Hernan⁸, Fhirli Adha Luthfia⁹, Indra Nur Alim¹⁰, Yuni Nasrul Latifi¹¹, Iin Tri Rahayu

---

⁴ Enang Hidayat *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 227.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021), h.299.

⁶ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h.78.

⁷ Muhamad Al Imran, "Implementasi Akad *Mudarabah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang". Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Malik Ibrahim Malang 2017).

⁸ Muharir Hernan, "Implementasi akad *Mudarabah* di Warung Cawan Coffe Gayo Ditinjau dari Hukum Islam". Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021).

Nur Lia¹², Yayat Hidayat Putra¹³ Penelitian terdahulu tersebut pada umumnya tidak secara khusus berkaitan dengan kaidah fikih tentang akad mudarabah sebagaimana yang dilakukan penelitian saat ini yang fokusnya menganalisis apakah ada kesesuaian atau tidaknya praktik akad mudarabah yang dilakukan di Pesantren Al-Barkah dengan sejumlah kaidah fikih akad mudarabah yang dikemukakan para ulama tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena secara langsung berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Data yang dihasilkan berbentuk uraian kata-kata atau kalimat, baik tertulis maupun lisan, tanpa dominasi angka, guna memahami permasalahan yang dibahas secara mendalam.¹⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk mengkaji secara mendalam latar belakang dan kondisi tempat penelitian.¹⁵ Peneliti melakukan penelitian langsung di kantin Pondok Pesantren Al-Barkah, Tanggeng, Cianjur. Analisis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad Mudarabah yang diterapkan di kantin tersebut.

Data primernya diperoleh dari responden melalui wawancara, dokumentasi yang diperoleh dari lapangan penelitian, yakni kantin Pondok Pesantren Al-Barkah Kecamatan Tanggeng Kabupaten Cianjur. Selain itu ditambah dengan referensi tentang

---

⁹ Fhirli Adha Luthfia. 'Penerapan Akad Pembiayaan Mudarabah Pada koperasi Al-Munawarah'. Skripsi. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁰ Indra Nur Alim. "Analisis Penerapan Pembiayaan Mudarabah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fajar Metro Pusat". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020)

¹¹ Yuni Nasrul Latifi, "Implementasi Akad Mudarabah Antara Warga Tunagrahita Dengan Kelompok Masyarakat Karang Patihan Bangkit dalam Kerajinan Tangan (studi di desa Karang Patihan kecamatan Balong kabupaten Ponogoro)." (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 2018).

¹² Iin Tri Rahayu Nur Lia, "Implementasi Praktik Akad Mudarabah Pengelolaan Dafamart Pondok Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Falah 4 Putri Jekulo Kudus)". Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fak. Syariah, IAIN Kudus, 2025.

¹³ Yayat Hidayat Putra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Bagi Hasil (Mudarabah) pada BUMP (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta)". *Al-Mazahib* 5, No. 2 (2017).

¹⁴ Kartini Kartono, *Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mundiur Maju, 2012), h.32.

¹⁵ Kartini Kartono, h.185.

“Kaidah Fikih Muamalah” karya Enang Hidayat, dan karya lainnya serta ditambah dengan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan. *Tahap pertama*, adalah observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang akurat mengenai peristiwa dan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas.¹⁶

Tahap kedua adalah wawancara (interview), yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung untuk memperoleh informasi secara lisan. Wawancara ini difokuskan pada permasalahan tertentu yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pengelola kantin Pondok pesantren Al-Barkah, *shahibul mal*, *mudharib*, dan onsumen (santri) di kantin Pondok Pesantren Al-Barkah.

Tahap ketiga, dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.¹⁸ Seperti buku, laporan, notulen rapat, dan catatan harian yang berisi informasi relevan dengan penelitian.¹⁹ Gunanya untuk memperoleh informasi berdirinya Pesantren dan kantin, staf-staf guru, *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal) kantin Pondok Pesantren Al-Barkah, dan tentang pengelolaan keuangan kantin Pondok Pesantren Al-Barkah.

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul, kemudian diolah secara sistematis hingga menghasilkan kesimpulan. Proses ini mencakup pencarian, penyusunan, dan interpretasi data dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumen terkait, sehingga temuan penelitian dapat dipahami dan disampaikan kepada pihak lain.²⁰ Analisis menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah : 1) reduksi data (data reduction); (2) penyajian data (data display); dan (3) penarikan kesimpulan.²¹

Reduksi data adalah proses merangkum informasi dengan menekankan hal-hal penting yang relevan untuk dianalisis dan disimpulkan. Reduksi dilakukan dengan cara

---

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.80.

¹⁷Sugiono, h.81.

¹⁸Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta; Pustaka Ilmu Group, 2020) h. 120.

¹⁹Rifa'i Abu Bakar, h.114.

²⁰Hardani, h.120

²¹Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: PT KBM Indonesia, 2021), hal.47.

abstraksi atau penyederhanaan data agar tetap fokus pada tujuan penelitian. Proses ini membantu memilah informasi yang kompleks dari lapangan, menghilangkan data yang tidak relevan, serta menyajikan data yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Penyajian data adalah proses menyusun informasi secara sistematis agar memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan merapikan dan menyusun data sehingga lebih terstruktur, memungkinkan analisis yang lebih jelas. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh umumnya berbentuk naratif, sehingga perlu disederhanakan tanpa mengurangi esensi atau maknanya.

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam analisis data penelitian, dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dengan konsep dasar yang relevan. Untuk memastikan validitas data, peneliti menerapkan berbagai metode, seperti perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, pernyataan di depan umum dan pribadi, serta menelaah dokumen. Setelah data dikumpulkan, dideskripsikan, dan diinterpretasikan, hasilnya dikonfirmasi kembali kepada sumber data untuk validasi dan perbaikan jika diperlukan.²²

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Kantin Pondok Pesantren Al-Barkah Kec. Tanggeung Kabupaten Cianjur

Kantin Pondok Pesantren adalah sebuah usaha bisnis yang memberikan pelayanan bidang dasar terhadap para pelanggan yang berkunjung ke kantin untuk menikmati minuman, dan makanan ringan biasanya kantin dibuka pada waktu pagi (sarapan), siang dan sore hari.

Kantin Pondok Pesantren Al-Barkah mulai beroperasi sejak tanggal 15 Juli 2020, yang saat ini sudah berusia 4 tahun dan memiliki 1 investor (pemegang saham) dan memiliki 1 karyawan (santri) yang mengelola kantin pondok pesantren Al-Barkah.²³

Dalam rangka memperoleh data yang lengkap, dan valid tentang pengelolaan kantin pondok pesantren perspektif akad *Mudharabah*. Peneliti mewawancarai Azkia Salamah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), Siti Aisyah sebagai pengelola usaha

---

²²Sugiono, h 175

²³Hasil Observasi, Shahibul Maal, (Tanggeung, juli,2024)

(*mudharib*) dan Elisa Nuraida Safitri sebagai konsumen. Semua responden tersebut penelitian dijadikan sebagai narasumber kunci atau data primer untuk mengungkap permasalahan yang sedang diteliti.

Sistem pengelolaan kantin pondok pesantren dirancang untuk memenuhi kebutuhan para santri supaya tidak belanja keluar komplek pesantren, serta memastikan makanan yang disediakan sesuai dengan aturan-aturan pesantren. Kantin di buka setiap hari pada jam 07.00-20.00 WIB.

Untuk mendapatkan data terkait proses pengelolaan kantin pondok pesantren Al-Barkah melalui wawancara dengan pemilik modal mengatakan bahwa:

Dalam pengelolaan kantin di sini saya menggunakan akad *Mudarabah* yaitu dengan menyediakan modal untuk memulai atau mengembangkan kantin, modal yang dikelola oleh *mudharib* selaku pengelola operasional kantin dan mengatur perbelanjaan untuk kantin. Karena dalam akad *Mudarabah* ada konsep berbasis bagi hasil. Dengan memilih mitra *mudharib* yang memiliki reputasi baik dan ikhlas dalam menjalankan. usaha. Selain itu, penting untuk memiliki kepercayaan penuh terhadap integritas dan komitmen mitra *mudharib*.²⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan pengelola usaha (*mudharib*) mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan bisnis di kantin pondok pesantren Al-Barkah memakai akad *Mudarabah* karena saya tidak mempunyai modal sendiri. Dan selain itu, sebagai bentuk pengkhidmatan saya kepada pondok pesantren Al-Barkah. Setiap hari memastikan bahwa makanan yang disajikan sehat, bergizi dan halal untuk dikonsumsi oleh santri. menjadikan dasar melakukan akad *Mudarabah* yaitu untuk meningkatkan usaha atau bisnis melalui kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Serta belajar menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan akad *Mudarabah*”.²⁵

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa kantin Pondok Pesantren Al-Barkah menggunakan akad *Mudarabah* yaitu pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola usaha untuk diolahkan dalam bentuk perdagangan.

Dalam pengelolaan kantin Pondok Pesantren Al-Barkah harus ada perjanjian sebelum memulai bekerja antara pemilik modal (*shahibul mal*) serta pengelola usaha (*mudharib*) dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam perjanjian *Mudarabah*. Kerjasama yang dilakukan kantin pondok pesantren Al-Barkah, yaitu

---

²⁴Azkie Salamah, Hasil Wawancara *Shahibul Maal*, Tanggeung 12 Juli, 2024, pukul 08.00-10.00 WIB.

²⁵Siti Aisyah, Hasil Wawancara *Mudharib*, Tanggeung 12 Juli 2024, pukul 13.00-15.00 WIB.

pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan kepercayaan kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk menjalankan bisnis usaha sesuai perjanjian yang tercantum dalam kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal (*shahibul mal*) mengenai perjanjian akad Mudarabah mengatakan bahwa:

“Bahwa pengelola usaha bersama-sama dengan pemilik modal sepakat melakukan perjanjian *Mudarabah* dalam usaha bisnis kantin pondok pesantren Al-Barkah. Perjanjian *Mudarabah* yang dipilih adalah perjanjian berbentuk tertulis yang isinya memuat perjanjian- perjanjian antara pengelola usaha dengan pemilik modal dijadikan pedoman dan pegangan dalam usahanya. dengan begitu pemilik modal langsung memberikan modal sebesar Rp 2.000.000 kepada pengelola untuk diusahakan dalam berdagang, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, yaitu 50% untuk pemilik modal, 25% untuk pengelola usaha, dan 25% untuk dishodaqohkan ke pondok pesantren Al-Barkah”.²⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan pengelola usaha (*mudharib*) mengatakan bahwa:

“Pengelola usaha menyepakati perjanjian dengan pemilik modal dalam perjanjian tertulis, saya menerima modal sebesar Rp. 2.000.000 untuk menjalankan usaha, dan pengelola setuju atas pembagian keuntungan tersebut. Dan dalam perjanjian tersebut membahas tentang objek *Mudarabah* atau jenis usaha yang dilakukan, batasan wewenang dan tanggung jawab pengelola usaha dan pemilik modal”.²⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan pemilik modal mengenai tujuan melakukan akad *Mudarabah* mengatakan bahwa:

“Tujuan melakukan akad untuk memenuhi rukun syarat Mudarabah dan menghindari kesalahpahaman antara pemilik modal dan pengelola usaha dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari nanti yang berimbas terjadinya kerugian dan sengketa. Perjanjian Mudarabah juga dijadikan petunjuk kerjasama antara kedua belah pihak dalam menjalankan bisnis usahanya”.²⁸

Menyambung hasil wawancara dengan pengelola usaha (*mudharib*) tentang isi perjanjian *Mudarabah* mengatakan bahwa:

“Unsur-unsur yang disepakati dalam perjanjian Mudarabah meliputi penetapan

---

²⁶Azkie Salamah, Hasil Wawancara *Shahibul Maal*, Tanggeung 12 Juli, 2024, pukul 08.00-10.00 WIB.

²⁷Siti Aisyah, Hasil Wawancara *Mudharib*, Tanggeung 12 Juli 2024, pukul 13.00-15.00 WIB.

²⁸Azkie Salamah, Hasil Wawancara *Shahibul Maal*, Tanggeung 12 Juli, 2024, pukul 08.00-10.00 WIB.

objek *Mudarabah* dan jenis usaha yang akan dilakukan sebelum melakukan bisnis agar usahanya berjalan dengan baik dan lancar”.²⁹

Menyambung hasil wawancara dengan pemilik modal (shahibul maal) mengenai perjanjian *Mudarabah* mengatakan bahwa:

“Dalam perjanjian *Mudarabah* penetapan kriteria yang berkaitan dengan kelalaian pengelola usaha yang akan mendatangkan kerugian tidak tercantumkan dalam perjanjian kontrak kerjasama saat perjanjian *Mudarabah* antara pemilik modal dan pengelola usaha. Mereka tidak menganggap penting dalam bisnis usahanya. Kalau dalam perjalanan usaha mengalami kerugian baru dicari solusi dalam mengatasi hal tersebut”.³⁰

Pada saat diwawancarai pengelola usaha mengatakan bahwa:

“Pemilik modal ikut campur mengatur dan berperan dalam kegiatan operasional bisnis usaha kantin pondok pesantren Al-Barkah, dan sangat kencang melontarkan kritikan terhadap pengelola usahanya, mulai dari kegiatan pelayanan pelanggan sampai pada menu pembelanjaan di kantin. Dan shahibul maal pada awal perjanjian memberikan kebebasan penuh untuk mengelola kantin, tetapi shahibul maal ikut campur dalam mengatur dengan memaksa untuk hanya membeli barang-barang tertentu, padahal shahibul tidak mengetahui makan-makanan apa saja yang suka dibeli santri”.³¹

Selanjutnya wawancara dengan salah satu konsumen kantin Pondok Pesantren Al-Barkah mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui bahwa kantin Pondok Pesantren Al-Barkah memakai prinsip syariah akad *Mudarabah*, saya mendengar dari teman-teman saya dan memang saya merasa nyaman karena sistemnya baik dan sesuai prinsip-prinsip syariah”.³²

Menyambung wawancara dengan konsumen tentang pembelanjaan dan harga di kantin Pondok Pesantren Al-Barkah :

“Saya belanja makanan di kantin setiap hari terutama pada jam istirahat, setiap hari saya suka membeli minuman, jajanan ringan, dan seminggu sekali saya suka membeli seblak. Terkait harganya cukup terjangkau dan sesuai dengan kantong santri”.³³

Wawancara dengan konsumen mengenai masalah di kantin Pondok Pesantren Al-Barkah mengatakan bahwa:

---

²⁹Siti Aisyah, Hasil Wawancara *Mudharib*, Tanggeung 12 Juli 2024, pukul 13.00-15.00 WIB.

³⁰ Azkia Salamah, Hasil Wawancara *Shahibul Maal*, Tanggeung 12 Juli, 2024, pukul 08.00-10.00 WIB.

³¹Siti Aisyah, Hasil Wawancara *Mudharib*, Tanggeung 12 Juli 2024, pukul 13.00-15.00 WIB.

³²Elisa, Hasil Wawancara Konsumen, Tanggeung 12 Juli 2024, pukul 16.00-17.00 WIB.

³³Elisa, Hasil Wawancara Konsumen, Tanggeung 12 Juli 2024, pukul 16.00-17.00 WIB.

“Saya pernah mengalami masalah ketika saya belanja ke kantin tidak ada makanan yang saya inginkan. Ya, mudah-mudahan kedepannya agar bisa menambah menu makanan, jajanan, minuman agar konsumen tidak merasa bosan dengan fasilitas di kantin ini. Dan juga kadang-kadang pelayanannya kurang memuaskan seperti saya mau beli makanan tapi tidak ada penjaganya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bertanggung jawab lagi”.³⁴

Selanjutnya wawancara mengenai kebersihan dan kenyamanan kantin Pondok Pesantren Al-Barkah mengatakan bahwa:

“Sejauh ini saya belum pernah menemukan permasalahan tentang kebersihan yang serius. Mungkin sesekali ada sampah yang belum terbangun kadang lantai kotor, tapi itu juga dibersihkan oleh petugas. Menurut saya kurangnya kesadaran para konsumen untuk membuang sampah karena kurangnya tempat sampah”.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan *shahibul mal, mudharib* dan konsumen kantin pondok pesantren Al-Barkah dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kantin pondok pesantren Al-Barkah menggunakan akad *Mudarabah* tetapi sebelum memulai atau membuka suatu usaha kedua belah pihak sepakat merumuskan dan menetapkan perjanjian kerjasama (akad *Mudarabah*) dalam bentuk tulisan. Begitu juga pihak pengelola usaha (*mudharib*) sudah mengelola bisnis usahanya dengan penuh bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional, mulai dari kegiatan pelayanan pelanggan sampai menjaga kebersihan dan keamanan. Dan dari tujuan diadakan perjanjian tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan bisnis usahanya. Isi dari perjanjian tersebut memuat unsur penetapan objek *Mudarabah* dan jenis usahanya.

Sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil merupakan hal yang penting harus dijelaskan secara jelas, dan transparan dalam perjanjian kerja sama (akad *Mudarabah*). Pembagian keuntungan dari hasil usaha adalah berupa imbalan yang diterima oleh pemilik modal dan pengelola usaha. Dimana dengan pembagian keuntungan hasil usaha diharapkan dapat mencegah kedua belah pihak dari perselisihan dalam bisnis usahanya. Pembagian keuntungan hasil usaha adalah salah satu unsur terpenting yang harus diperjelas secara rinci dalam perjanjian *Mudarabah*.

Selanjutnya hasil wawancara dengan *shahibul maal* mengenai pembagian

---

³⁴Elisa, Hasil Wawancara Konsumen, Tanggeung 12 Juli 2024, pukul 16.00-17.00 WIB.

³⁵Elisa, Hasil Wawancara Konsumen, Tanggeung 12 Juli 2024, pukul 16.00-17.00 WIB.

keuntungan mengatakan bahwa:

“Sistem pembagian keuntungan hasil usaha ditetapkan pada saat perumusan, dan penetapan perjanjian kontrak kerja sama dan dibagikan langsung dalam tiga bulan sekali”.³⁶

Menyambung hasil wawancara dengan pengelola usaha mengatakan bahwa:

“Pembagian keuntungan terhadap hasil usaha kantin Pondok Pesantren Al-Barkah berdasarkan perjanjian awal. Dimana keuntungan dibagi menurut persentase tidak ditentukan dengan bentuk uang sebesar 1.000.000 misalnya”.³⁷

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *Mudarabah* pada pembagian hasil pada kantin Pondok Pesantren Al-Barkah adalah pembagian keuntungan didasarkan pada kontrak kerjasama. Dan dalam bagiannya tidak menetapkan jumlah tetap dalam pembagian dari keuntungan yang di dapatkan

Hasil wawancara dari awal sampai akhir mengenai sistem pengelolaan kantin, perjanjian akad *Mudarabah* dan pembagian hasil sudah sesuai dengan perspektif akad *Mudarabah*. Namun, masih ada sisi yang kurang relevan pada saat penerapan pengelolaan kantin perspektif akad *Mudarabah*, yaitu **Pertama**, perjanjian akad *Mudarabah* dalam bentuk tulisanya kurang jelas karena lupa merumuskan, dan menetapkan tentang kriteria *mudharib* yang dianggap lalai, dan lengah pada saat mengelola usaha yang berimbas pada jatuh kerugian (bangkrut). **Kedua**, pemilik modal (*shahibul mal*) masih ikut mencampuri dalam urusan pengelolaan usaha (*mudharib*) Pondok Pesantren Al-Barkah.

Pengelolaan Kantin Pondok Pesantren Al-Barkah Perspektif Kaidah Fikih Akad Mudarabah

Para ulama menyimpulkan definisi mudarabah atau qirad adalah bentuk syirkah dalam bisnis, di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain mengelola usaha sebagai wakil yang dipercaya. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bersama: pemilik modal kehilangan investasinya, sementara pengelola tidak mendapatkan imbalan atas usahanya.³⁸

---

³⁶ Azkia Salamah, Hasil Wawancara *Shahibul Maal*, Tanggeung 12 Juli, 2024, pukul 08.00-10.00 WIB.

³⁷ Siti Aisyah, Hasil Wawancara *Mudharib*, Tanggeung 12 Juli 2024, pukul 13.00-15.00 WIB.

³⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet-1. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016, h. 159.

Akad mudarabah dipraktikkan di kantin Pondok Pesantren Al-Barkah, Tanggeng, Cianjur. Dari hasil observasi dan wawancara dengan pengelola kantin pondok tersebut diperoleh hasil temuan bahwa pengelola kantin Pondok Pesantren Al-Barkah pada awalnya kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerja sama (akad *Mudarabah*) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) secara tertulis sebelum memulai aktivitas bisnis usahanya. Kemudian pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uang kepada pengelola usaha (*mudharib*) sebagai modal usaha, dan pengelola usaha menerima uang tersebut sebagai modal usahanya untuk dikelola sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama (akad *Mudarabah*).

Perjanjian kerja sama yang diterapkan memiliki kemiripan dengan praktik *Mudarabah* antara Siti Khadijah dan Nabi Muhammad. Saat itu, Khadijah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sementara Nabi Muhammad berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*), dengan menjalankan perdagangan ke luar negeri. Dalam skema ini, pemilik modal menyediakan dana atau barang dagangan, sementara pengelola usaha menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.³⁹

Berdasarkan hasil temuan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan akad *Mudarabah* serta pembagian hasil telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa akad *Mudarabah* dianggap sah apabila dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* oleh pihak yang memiliki keahlian berdagang (*mudharib*). Syarat sah lainnya yang terpenuhi dalam akad ini meliputi adanya modal atau barang dalam akad, kejelasan jumlah modal, kejelasan persentase keuntungan, serta *ijab* dari pemilik modal yang bersifat mutlak, tanpa mengikat pengelola usaha dalam pengelolaannya.⁴⁰

Modal usaha dalam akad *Mudarabah* yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola usaha berbentuk uang tunai. Pendapat ini sesuai dengan mayoritas fuqaha yang mensyaratkan modal harus berbentuk uang, bukan barang, untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dalam penentuan nilai modal. Namun, mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih fleksibel dengan membolehkan modal dalam bentuk barang,

---

³⁹Adiwarman, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.204

⁴⁰Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h.195

asalkan nilai barang tersebut dapat ditentukan secara jelas.⁴¹

Namun, terdapat beberapa aspek yang masih kurang sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam perjanjian kerja sama (*akad Mudarabah*). Salah satu kelemahan utama adalah tidak dicantumkannya kriteria kelalaian (*taqshir*) pengelola usaha (*mudharib*) dalam perjanjian. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha, terutama terkait tanggung jawab atas kerugian atau kebangkrutan.

Ketidakteraturan dalam perumusan kriteria kelalaian dapat meningkatkan risiko konflik, kesulitan dalam menentukan tanggung jawab, serta potensi kerugian bagi pemilik modal. Oleh karena itu, sangat penting bagi perjanjian *Mudarabah* untuk secara jelas mengatur standar kelalaian pengelola dan mekanisme pengelolaan kerugian jika kelalaian terbukti. Kejelasan ini tidak hanya melindungi hak kedua belah pihak, tetapi juga memastikan kerja sama yang lebih transparan, adil, dan terhindar dari ketidakpastian (*gharar*).

Dengan berdasarkan hasil temuan peneliti pada pengelolaan kantin pondok pesantren Al-Barkah sudah sesuai dengan rukun akad *Mudarabah*. Namun, dikategorikan *fasid* (cacat) karena ada yang belum sesuai dengan syarat *Mudarabah*, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan pekerjaan (*amal*) harus berbentuk perdagangan dan pemilik modal tidak mempersulit pihak pengelola modal dalam melakukan perdagangan.

Syarat pada pekerja yang pertama sudah terpenuhi yaitu dengan usaha yang berbentuk perdagangan. *Mudharib* (pengelola usaha) sudah melakukannya dengan mengolah modal pada kantin pondok pesantren Al-Barkah. Namun, syarat yang kedua tidak sesuai dengan syarat *Mudarabah* yang berhubungan dengan pekerja yaitu pemilik modal (*shahibulmaal*) mempersulit pihak pengelola dalam melakukan perdagangan dengan arti pemilik modal ikut mencampuri dalam pengelolaan usaha kantin Pondok Pesantren Al-Barkah. Dalam hal kaidah fikih menjelaskannya sebagai berikut :

لو شرط في المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربة.

*Jika adanya persyaratan pekerjaan dilakukan oleh pemilik modal, maka hukumnya fasad.*⁴²

---

⁴¹Andiwarmanh,*op.cit.*, h.205

⁴² Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, h. 236.

Maksud kaidah fikih tersebut adalah dalam akad mudarabah, pemilik modal hanya berperan sebagai pemberi modal, sementara pengelola bertugas menjalankan usaha. Pemilik modal tidak boleh merangkap sebagai pengelola, baik secara langsung maupun bersamaan dengan pengelola. Jika ia ikut serta dalam pengelolaan, maka akad tersebut tidak lagi disebut mudarabah. Oleh karena itu, syarat yang mengizinkan pemilik modal turut mengelola dianggap tidak sah (*fasad*).⁴³ Dengan kata lain pemilik modal dilarang ikut mencampuri dalam pengelolaan usahanya, dan pengelola usaha tidak boleh lalai, dan lengah dalam menjalankan usahanya.

Dalam pembiayaan *Mudarabah*, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memperoleh keuntungan. Keuntungan dalam *Mudarabah* merupakan kelebihan dari modal usaha yang dikelola. Untuk memastikan keadilan dan kesesuaian dengan prinsip syariah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian keuntungan, yaitu:

1. Keuntungan harus dibagi kepada kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan menetapkan keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.
2. Proporsi keuntungan harus ditentukan dengan jelas. Bagian keuntungan bagi setiap pihak harus dinyatakan sejak awal dalam kontrak dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan dan tidak dalam bentuk nominal tetap. Jika ada perubahan dalam pembagian keuntungan, maka harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Pemilik modal (*shahibul maal*) menanggung semua kerugian. Jika usaha mengalami kerugian yang bukan akibat kesalahan pengelola, maka pemilik modal yang harus menanggungnya.
4. Pengelola usaha (*mudharib*) hanya bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran kontrak. Pengelola usaha tidak boleh dipaksa menanggung kerugian kecuali jika terbukti ada unsur kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kesepakatan.

Akad *Mudarabah* yang dapat diterapkan di kantin pondok pesantren Al-Barkah sebagai berikut:⁴⁴

---

⁴³ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, h. 237.

⁴⁴ *Ibid.*

- a. Pemilik modal menyediakan dana untuk mendukung operasional kantin, termasuk biaya sewa, pembelian peralatan, serta pengelolaan operasional sehari-hari.
- b. Keuntungan usaha dibagi antara pemilik modal dan pengelola sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal perjanjian.
- c. Harus disepakati bahwa dalam pembagian keuntungan misalnya pemilik modal mendapatkan keuntungan 60% dan pengelola kantin mendapatkan 40%, maka pembagian tersebut harus diikuti. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

والربح على ما شرطاً.

Keuntungan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.

Kaidah ini menekankan pentingnya kesepakatan awal dalam pembagian keuntungan akad mudarabah, sebagaimana dalam syirkah, misalnya pemilik modal mendapat 60% dan pengelola 40%. Kesepakatan ini mencegah perselisihan, terutama karena ketidaksesuaian keuntungan dengan harapan pengelola. Oleh karena itu, sebelum akad dilakukan, pembagian keuntungan harus ditetapkan dengan jelas dan tanpa paksaan.⁴⁵

- d. Pemilik modal menyediakan dana untuk mendukung operasional kantin, termasuk biaya sewa, pembelian peralatan, serta pengelolaan operasional sehari-hari.
- e. Pemilik modal menanggung risiko kerugian finansial, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Pengelola hanya bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dan tidak mendapatkan hasil jika usaha tidak menghasilkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

إنّ العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به ضمان.

Sesungguhnya pekerja (pengelola modal) dipercaya mengelola harta qirad. Maka tidak ada kaitan tanggungan dengannya.

Kaidah ini menjelaskan bahwa akad mudarabah memiliki keterkaitan dengan akad wadiah, yakni amanah atau titipan. Pemilik modal mempercayakan pengelolaan modal kepada pengelola sesuai keahliannya. Kepercayaan ini harus dijaga agar pemilik modal tetap percaya. Sebagai pemegang amanah, pengelola tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan modal jika bukan akibat kelalaiannya.⁴⁶

- f. Pengelolaan dan pengawasan yaitu pengelolaan bertanggung jawab penuh atas

---

⁴⁵ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, hlm. 231.

⁴⁶ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, hlm. 234.

operasional harian kantin. Pemilik modal biasanya tidak terlibat dalam manajemen harian, tetapi mereka berhak meminta laporan keuangan dan evaluasi dalam bekerja.

g. Akad *Mudarabah* berakhir jika kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama atau jika syarat-syarat akad tidak terpenuhi. Pada akhir akad, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan modal dikembalikan kepada pemilik modal.

Kesimpulan

Pengelolaan kantin Pondok Pesantren Al-Barkah menerapkan akad *Mudarabah*, di mana sebelum memulai usaha, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola kantin (*mudharib*) menyusun perjanjian kerja sama secara tertulis. Secara umum pengelolaan kantin tersebut telah sesuai dengan kaidah fikih akad *Mudarabah* dan memenuhi rukun akad. Namun, perjanjian tersebut masih memiliki kekurangan dalam pemenuhan syaratnya. Beberapa aspek yang belum sesuai antara lain tidak dicantumkannya kriteria kelalaian pengelola usaha yang dapat menyebabkan kerugian serta adanya keterlibatan pemilik modal dalam pengelolaan kantin, yang bertentangan dengan prinsip *Mudarabah* karena seharusnya pengelola memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan usaha. Penelitian ini memberikan rekomendasi penelitian lanjutan mengenai kajian usul fikih terhadap praktik akad *mudarabah* di lembaga pesantren, dan lembaga lainnya. Sehingga penelitian tersebut dapat berkontribusi bagi perkembangan hukum ekonomi syariah yang dipraktikkan di lembaga pendidikan seperti Pondok Pesantren, dan lembaga lainnya.

Referensi

- Aisyah, Siti. Hasil Wawancara *Mudharib*, Tanggeung 12 Juli 2024, pukul 13.00-15.00 WIB.
- Al Imran, Muhamad. “Implementasi Akad *Mudarabah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang”. *Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Malik Ibrahim Malang, 2017.*
- Alim, Indra Nur . “Analisis Penerapan Pembiayaan *Mudarabah* Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fajar Metro Pusat”. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.*
- Elisa, Hasil Wawancara Konsumen, Tanggeung 12 Juli 2024, pukul 16.00-17.00 WIB.

- Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002).
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012).
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta; Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Hernan, Muharir. “Implementasi akad Mudarabah di Warung Cawan Coffe Gayo Ditinjau dari Hukum Islam”. *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet-1. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Kartono, Kartini. *Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mundur Maju, 2012).
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Latifi, Yuni Nasrul. “Implementasi Akad Mudarabah Antara Warga Tunagrahita dengan Kelompok Masyarakat Karang Patihan Bangkit dalam Kerajinan Tangan (Studi di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong kabupaten Ponogoro).” *Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 2018*.
- Luthfia, Fhirli Adha. “Penerapan Akad Pembiayaan Mudarabah Pada koperasi Al-Munawarah”. *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*).
- Nur Lia, Iin Tri Rahayu, “Implementasi Praktik Akad Mudarabah Pengelolaan Dafamart Pondok Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Falah 4 Putri Jekulo Kudus)”. *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fak. Syariah, IAIN Kudus, 2025*.
- Noor, Syafri Muhamad, *Hadist Syirkah dan Mudarabah*, (Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Putra, Yayat Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Bagi Hasil (Mudarabah) pada BUMP (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta)”. *Al-Mazahib 5, No. 2 (2017)*.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021).
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: PT KBM Indonesia, 2021).

Salamah, Azkia. ,Hasil Wawancara *Shahibul Maal*, Tanggeung 12 Juli, 2024, pukul 08.00-10.00 WIB.

Suwiknyo, Dwi. *Pengantar Akuntansi Syariah*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grapika, 2012).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).